

BAB IV

OBJEK PENELITIAN

Pada Bab ini, peneliti akan menguraikan secara singkat mengenai Provinsi Jawa Barat, apa visi, misi, dan fungsi serta struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian penulis akan memberikan gambaran umum kondisi perkonomian dan potensi dan peluang investasi, mengidentifikasi apa saja faktor internal dan eksternal Provinsi Jawa Barat untuk kemudian dilakukan analisis terhadap kemampuan keuangan daerah dalam menerbitkan obligasi daerah. Hal ini penting dilakukan sebelum membahas proses pelembagaan (institusionalisasi) yang akan diuraikan pada bab-bab berikutnya, karena analisa tersebut merupakan salah satu persyaratan bagi suatu Pemerintah Daerah sebelum menerbitkan Obligasi Daerah.

4.1 Mengenal Provinsi Jawa Barat: Visi, Misi Dan Fungsi, Struktur Organisasi

Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378). Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di Indonesia. Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta,

Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Provinsi ini secara geografis terletak di antara 5 o 50 ' - 7 o 50 ' Lintang Selatan dan 104 o 48 ' - 108 o 48 ' Bujur Timur, dengan luas wilayah 37851.11 km². Kawasan utara Jawa Barat merupakan dataran rendah sedangkan kawasan selatan merupakan daerah berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta kawasan tengah merupakan kawasan dengan geografi bergunung-gunung. Secara administratif, Jawa Barat berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Jawa Timur, di sebelah Timur berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Banten. Jawa Barat terdiri dari 16 Kabupaten dan 9 Kota. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi geografis yang strategis. Hal tersebut merupakan keuntungan bagi Provinsi Jawa Barat terutama terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Selain itu, Jawa Barat memiliki lahan yang subur yang berasal dari endapan vulkanis dan dialiri oleh banyak aliran sungai yaitu sungai Cisadane, Sungai Ciliwung, Sungai Cisande, Sungai Cimandiri, Sungai Citarum, Sungai Cimanuk, dan Sungai Citanduy sehingga sebagian besar lahannya digunakan untuk pertanian.

Adapun visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2013-2018 adalah

"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua".

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Maju : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial. (2) Sejahtera

: adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan. (3) Untuk Semua : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat.

Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2013-2018 ada lima, diantaranya (1) Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi. (2) Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. (3) Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota. (4) Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu

meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. (5) Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal. Struktur Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari 63 (enam puluh tiga) Organisasi perangkat Daerah (OPD) termasuk Biro Investasi dan BUMD yang menjadi lokasi penelitian penulis.

4.2 Biro Investasi dan BUMD

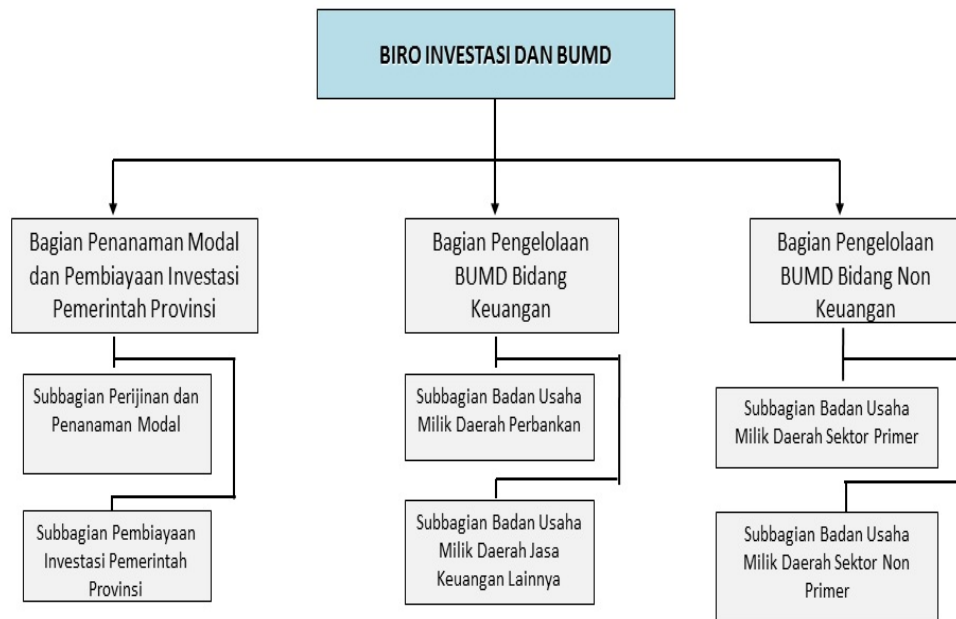
Biro Investasi dan BUMD ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Setwan DPRD Provinsi Jawa Barat. Biro ini merupakan salah satu Unit Pembantu Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain ; Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, koordinasi, pembinaan dan pengendalian, fasilitasi, serta pengembangan kerjasama Pemerintah Provinsi Bidang Perijinan dan Penanaman Modal, Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi, Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan dan Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan. Biro ini termasuk biro yang baru dibentuk dalam rangka penerbitan obligasi daerah. Adapaun biro yang lama Biro

Administrasi Perekonomian, dan Biro Bina Produksi menjadi Biro Perekonomian bergabung menjadi Biro Perekonomian

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro Investasi dan BUMD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum Perijinan dan Penanaman Modal, Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi, Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan dan Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi Perijinan dan Penanaman Modal, Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi, Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan dan Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan;
- c. Pengembangan kerjasama Pemerintah Provinsi Bidang Perijinan dan Penanaman Modal, Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi, Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan dan Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan;
- d. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi Bidang Perijinan dan Penanaman Modal, Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi, Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan dan Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan

Adapun Struktur Biro Investasi dan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana Gambar 4.1 berikut :



PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SETDA DAN SETWAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT

Gambar 4.1 Struktur Biro Investasi dan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Penerbitan Obligasi Daerah (OD) sediaan akan dilaksanakan di Biro ini Pada Bagian Penanaman Modal dan Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi, Subbagian Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi. Pada Sub Bagian Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi ini akan disusun bahan kebijakan tentang Penerbitan Obligasi Daerah, Unit Pengelola OD, SOP OD, Mitigasi dan Pengelolaan Resiko penerbitan OD, Master Plan Pengembangan Investasi Pemda, Indikator Kelayakan Investasi Pemda, Management Pengelolaan Resiko, Tatacara Investasi PEMDA dan Penerusan Obligasi Daerah. Di Bagian dan Subbagian inilah yang akan menjadi lokasi penelitian peneliti.

Biro Investasi dan BUMD senantiasa berupaya untuk memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara prima, cepat dan penuh inovasi dalam menunjang berbagai macam pembangunan di Jawa Barat, baik perekonomian maupun secara fisik. Selain itu, sedikit besarnya dapat berperan

dalam menghadapi berbagai perubahan pembangunan yang semakin kompleks dan cepat seiring perkembangan zaman dan teknologi, dengan mengantisipasi berbagai resiko dan menemukan berbagai peluang pengembangan yang lebih besar. Dengan demikian Biro Investasi dan BUMD akan menjadi bagian penting bagi Pemerintah maupun masyarakat Jawa Barat dalam pembangunan menuju Jawa Barat sebagai Provinsi Termaju di Indonesia.

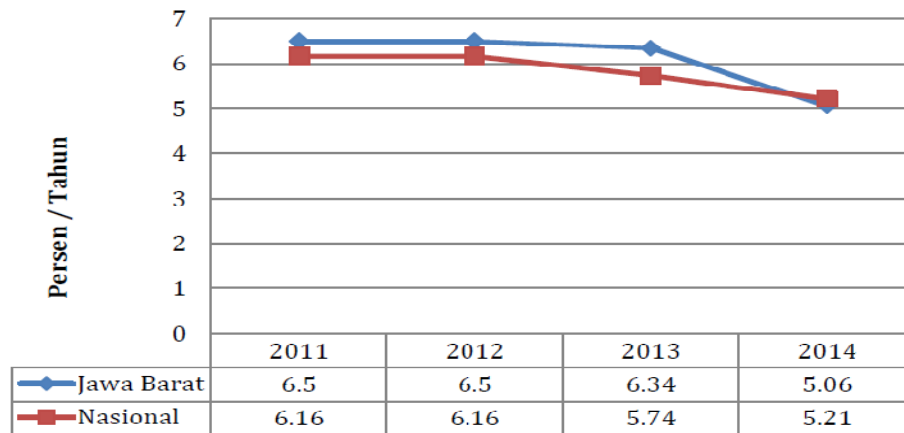
Saat ini Biro Investasi dan BUMD dihadapkan pada isu-isu global, nasional, maupun regional dan lokal yang semakin kompleks, khususnya isu-isu lokal Jawa Barat antara lain menyangkut kewenangan perijinan, pelayanan, ketenagakerjaan, promosi investasi, pertumbuhan investasi, Pengelolaan BUMD agar berorientasi profit dan bukan menjadi beban, penataan aset BUMD serta berbagai kesenjangan sosial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian kesejahteraan masyarakat.

4.3 Perekonomian Provinsi Jawa Barat

Jumlah penduduk Jawa Barat menurut BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 mencapai 44.548.431 jiwa atau 18,24% penduduk Indonesia, terdiri dari laki-laki sebanyak 22.609.621 jiwa dan perempuan sebanyak 21.938.810 jiwa (ditambah spasi) (Pusdalisbang Provinsi Jawa Barat, 2013). Secara demografis, komposisi penduduk Jawa Barat berdasarkan kelompok umur menurut Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010 adalah kelompok umur 0-14 2 tahun sebesar 29,27%, kelompok umur 15 – 59 tahun (usia produktif) sebesar 63,69% , dan kelompok umur 60 tahun keatas (kelompok masyarakat lanjut usia berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia) sebesar 7,04%. Berdasarkan publikasi BPS selama kurun waktu Tahun 2007-2012, perekonomian Jawa Barat tumbuh rata-rata 5,86% dengan capaian tertinggi pada Tahun 2011 sebesar 6,48%. Rata-rata inflasi selama periode

tersebut sebesar 5,45% dengan capaian terendahnya adalah 3,09% pada Tahun 2009 dan inflasi tertinggi adalah 11,11% pada Tahun 2008.

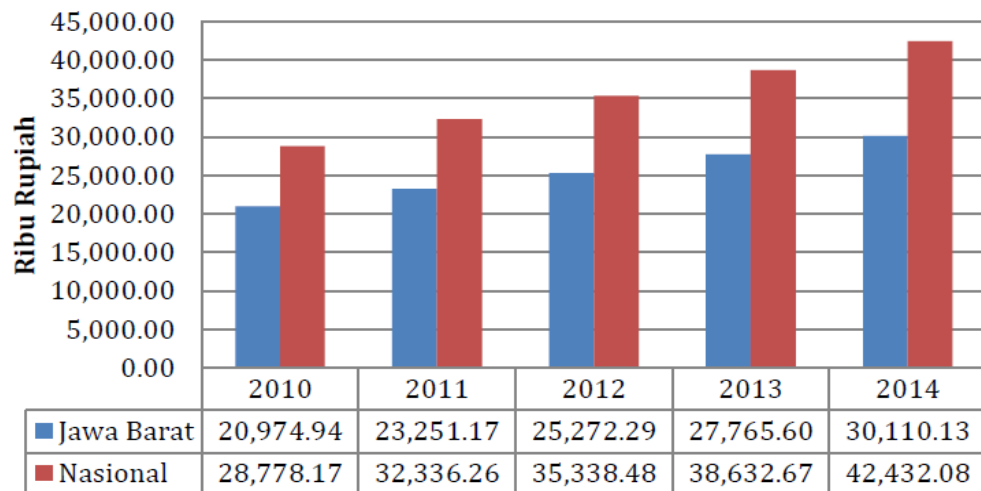
Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi Provinsi Jawa Barat diilustrasikan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan kemampuan sumber daya ekonomi dan kapasitas lapangan usaha dalam periode tahun berjalan. Kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat selama tahun 2012-2014 berfluktuatif dan memiliki kecenderungan menurun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi seama periode tersebut sebesar 6,1 persen lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional sebesar 5,90 persen sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.2 di bawah ini :



Sumber : BPS 2014

Gambar 4.2 Laju pertumbuhan PDRB

Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB per kapita di Jawa Barat selama kurun waktu 2010 – 2014 cenderung meningkat, yang menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan di provinsi ini walaupun berada dari rata-rata nasional pada periode tersebut. Jika pada tahun 2010 rasio antara PDRB perkapita Jawa Barat dan PDB nasional sebesar 72,88%, maka rasionya menurun menjadi 70,96% sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.3.



Sumber : BPS 2014

Gambar 4.3 PDRB Per Kapita

Disisi lainnya, berdasarkan sisi produksi, kapasitas sektor *non-tradable* (sektor jasa dan perdagangan) semakin besar terkait dengan keunggulan Jawa Barat sebagai pusat kuliner dan fashion yang menarik bagi turis domestik maupun asing untuk mengunjungi Jawa Barat terutama Kota Bandung dan sekitarnya.

Sementara itu, pertumbuhan sektor yang *tradable* (pertanian dan industri) cenderung lebih rendah dari rata-rata LPE Jawa Barat. Sektor industri pengolahan yang merupakan sektor dominan PDRB Jawa Barat tumbuh 6,21% Tahun 2011 setelah mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2009 sebesar 1,74%. Namun Tahun 2012 melambat menjadi 3,94% seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekspor Jawa Barat menjadi 5,52% dibandingkan Tahun 2011 yang mencapai 6,51%.

Selain menggunakan PDRB, pemerintah daerah dapat mengukur kemampuan keuangan daerahnya menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasar data dari Total pendapatan daerah provinsi Jawa Barat tahun 2011 adalah 11 Triliun sedangkan PAD provinsi Jawa Barat adalah 8Triliun. Rasio Pendapatan 3 Asli Daerah terhadap pendapatan daerah tahun 2011

adalah sebesar 76,9%. Sedangkan tahun 2012 total Pendapatan Daerah provinsi Jawa Barat adalah 16 Triliun sedangkan Pendapatan Asli Daerah provinsi Jawa Barat adalah 9 Triliun. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah tahun 2012 adalah sebesar 59,18%. Ditahun 2013 melonjak sekitar 12,36 trilyun dan terus menunjukkan peningkatan menjadi 15 trilyun di 2014 dan 16 trilyun di 2015.

4.4 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

Identifikasi terhadap faktor internal dan faktor eksternal ini diperlukan sebelum dilakukan analisis terhadap kemampuan Provinsi Jawa Barat dalam menerbitkan Obligasi Daerah. Faktor intenal merupakan komponen-komponen atau variabel yang berasal atau berada di dalam organisasi, dalam hal ini Pemprov Jabar. Komponen-komponen dari lingkungan ini cenderung lebih mudah dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena berada didalam jangkauan intervensi mereka. Sedangkan lingkungan eksternal terdiri dari komponen-komponen yang pada umumnya memiliki cakupan yang luas dan tidak bisa segera diaplikasikan untuk mengelola organisasi. Secara umum, lingkungan eksternal terdiri dari : komponen sosial, ekonomi, politik, hukum dan teknologi. Berdasarkan hasil wawancara dan pencarian data atau informasi melalui sumber-sumber yang terkait, maka didapat faktor internal dan eksternal.

4.4.1 Identifikasi faktor internal

Berdasarkan sumber data yang diperoleh selama penelitian, baik primer maupun sekunder, dapat diidentifikasi kondisi faktor internal, sebagai berikut:

1. Pinjaman Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2015 lampiran VII, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai sekarang belum memiliki pinjaman daerah, sehingga posisi pinjaman masih 0 (nol)

2. Batasan Maksimal Pinjaman

Sesuai PP 30 Tahun 2011 pasal 15, besaran maksimum pinjaman adalah jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan Umum (PU) APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk DAK, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Tabel 4.1

APBD Provinsi Jawa Barat TA 2015

(dIm jutaan)

Total Pendapatan Daerah	:	Rp	24.009.981
DAK	:	Rp	18.904
Dana Darurat	:	Rp	
Penerimaan earmarked :	:	Rp	
- Dana Otsus & Penyesuaian	:	Rp	
- DBH DR	:	Rp	
- DBH CHT	:	Rp	92.076
- DBH Migas	:	Rp	
- Hibah	:	Rp	
Total Pendapatan Umum	:	Rp	<u>23.936.809</u>
Maksimal kumulatif pinjaman (75% Pendapatan Umum)	:	Rp	17.952.607

Sumber : DJPK, (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan umum APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sebesar Rp17,95 triliun. Besaran ini jauh melebihi rencana penerbitan obligasi daerah sebesar Rp4 triliun. Dengan demikian, syarat jumlah kumulatif pinjaman daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerbitkan obligasi daerah terpenuhi.

3. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

DSCR merupakan rasio kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman. Rasio DSCR dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{\{PAD + (DBH - DBHDR) + DAU\} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran pokok pinjaman} + \text{bunga} + \text{biaya lain}} > 2,5$$

DSCR = Debt Service Coverage Ratio atau Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

Dengan asumsi bahwa pemerintah daerah harus membayar pinjaman setiap tahun (meskipun untuk obligasi dibayar pada saat jatuh tempo), perhitungan DSCR harus dibuat untuk setiap tahun hingga tahun obligasi daerah jatuh tempo. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa rasio kemampuan membayar kembali pinjaman tetap berada pada posisi yang diperbolehkan selama obligasi daerah belum jatuh tempo.

Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh perhitungan DSCR untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang tertera dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perhitungan DSCR Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(dalam jutaan)

Tahun/Uraian	2013	2014	2015	Rata-rata
PAD	12.360.110	15.038.153	16.032.856	14.477.040
DAU	1.472.453	1.687.686	1.303.654	1.487.931
DBH	1.398.007	1.874.132	1.894.481	1.358.977
DBHDR	-	-	-	-
Belanja Wajib	1.962.538	1.874.132	1.894.481	1.910.384

Jumlah				15.413.564
Pokok Pinjaman				4.000.000
Bunga				400.000
Biaya				200.000
Jumlah				4.600.000
<i>DSCR</i>				3,4

sumber : DJPK (*data diolah*)

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa kemampuan membayar kembali utang Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan perhitungan *DSCR* memenuhi syarat ketentuan. Nilai *DSCR* yang diperoleh sebesar 3,4 melebihi ketentuan 2,5.

4. Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Berdasarkan PP 30 Tahun 2015 tentang pinjaman daerah, agar pemda dapat memenuhi persyaratan penerbitan Obligasi Daerah, maka hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI harus mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sekurangnya 3 (tiga) kali berturut. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah 5 (lima) kali mendapatkan opini WTP untuk tahun 2011 s.d 2015.

5. Transparansi Pelaksanaan Pemerintahannya

Tranparansi merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya yaitu dengan adanya keterbukaan informasi yaitu dengan mudahnya akses untuk mendapatkan informasi. Dalam menjalankan fungsi pemerinahan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan sudah tarnsparan. Hal ini dapat dilihat dari adanya website yang dimiliki oleh pemprov Jabar (<http://www.jabar.go.id/>) juga adanya dari link yang terkait (<http://jabar.bps.go.id>) yang menyajikan informasi kekinian tentang Jawa Barat. Informasi yang dapat diperoleh dari website tersebut adalah lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pelayanan Publik, Hasil

Pembangunan, Fasilitas Daerah, dan Basis Data sampai proses pengadaan (*e-procurement*). Hal-hal informasi terbaru pun baik itu rencana kerja pemerintah juga terupdate di website tersebut.

Namun, masih terdapat beberapa kekuarangan didalam penampilan informasi tersebut diantaranya adalah tidak semua data yang dibutuhkan tersedia secara lengkap, dan khusus untuk data APBD juga belum disampaikan secara *up to date*. Namun hal demikian dapat dipahami mengingat legalitas laporan APBD yang harus mendapatkan persetujuan dewan dalam laporan pertanggungjawabanya. Akan tetappi bukan berarti tidak ada sama sekali data tersebut melainkan masih bersifat sementara.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau yang biasa disingkat RPJPD disusun berdasrkan visi, misi dan tujuan pebangunan daerah yang telah ditetapkan merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam RPJPD. RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yang telah disusun, tepatnya di bab IV Pendanaan Pembangunan Daerah disebutkan bahwa salah satu strategi pendanaan pembangunan daerah adalah dengan Obligasi Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan dana pembangunan daerah. RPJMD 2013-2018 dalam Bab III dan Bab IV. Bab III terdapat di dalam arah kebijakan pembiayaan Daerah. Perintisan pelaksanaan penerbitan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis. Di dalam Bab IV terdapat di dalam Bidang Perencanaan Pembangunan, point 41.16 bidang perhubungan, yang menyatakan bahwa belum memadainya keberadaan bandar udara untuk menampung penumpang dan barang baik domestik maupun internasional, sehingga salah satu arah kebijakannya adalah pengembangan Bandara.

7. Kompetensi sumber daya manusia

Salah satu indikator dalam melihat kompetensi sumber daya manusia adalah melalui pendidikan yang telah ditempuh. Berdasarkan sumber yang diperoleh diketahui bahwa taraf pendidikan penduduk di Jawa Barat sejak tahun 2014-2015 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan formal PNS dilingkungan Dinas/Badan/Lembaga di Jawa Barat yang didominasi lulusan diploma sebanyak 25,68% dan 48,74% telah menempuh pendidikan strata-1 (S1) keatas. Demikian pula dengan Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin yang lebih dari 73% didominasi oleh lulusan SMA keatas.

Secara umum diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2009-2013 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 73,58 yang jauh diatas rata-rata nasional sebesar 66,25. Tentunya hal tersebut merupakan pencapaian dan kerja keras dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kenaikan IPM ini salah satunya dikarenakan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Hal ini merupakan salah satu faktor penguat untuk penerbitan obligasi daerah. Namun, selama dilakukan penelitian, peneliti mendapatkan informasi pegawai yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan di Biro Investasi dan BUMD masih banyak yang belum sesuai di bidangnya. Hal ini peneliti alami sendiri ketika menggali informasi dan informan pun juga mengakui bahwa hanya ada beberapa orang yang paham terkait perekonomian Jawa Barat secara makro dan terkait penerbitan obligasi daerah.

8. Masa Jabatan Kepala Daerah

Menurut peraturan perundangan yang berlaku, masa jabatan kepala daerah untuk satu periode adalah lima tahun kerja dan boleh mencalonkan

lagi untuk periode kedepan maksimal dua periode berturut. Masa Kerja kepala daerah ini tentunya akan mempengaruhi arah keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah karena pergantian kepala daerah besar kemungkinan akan perubahan kebijakan.

4.4.2 Identifikasi faktor eksternal

Selain faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi penerbitan obligasi daerah sesuai dengan yang telah dibahas di subbab sebelumnya diatas, faktor eksternal disini juga dipertimbangkan. Faktor eksternal ini merupakan keadaan yang ada di luar internal Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Selain kondisi sosial dan politik, kondisi makro ekonomi nasional juga diperhatikan. Adapun Faktor eksternal yang teridentifikasi sebagai berikut :

1) Peraturan Perundang-Undangan

Dalam menunjang penerbitan obligasi daerah, maka diterbitkanlah Peraturan perundang-undangan, diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah sebagaimana diubah PP Nomor 30 Tahun 2011.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah Sebagai mana diubah PMK Nomor 111/PMK.07/2012 sebagaimana diubah PMK Nomor

180/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah

- f. Panduan Penerbitan Obligasi Daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan tahun 2015.

2) Lembaga Bursa

Bappepam, Lembaga Keuangan (Bappepam LK, sekarang berubah menjadi OJK), sebagai pengawas pasar modal telah mempersiapkan dan memfasilitasi peraturan perundangan dalam rangka penerbitan obligasi daerah ini. Peraturan tersebut antara lain :

- a. Peraturan Nomor VIII.G.14 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Nomor VIII.G.15 tentang Pedoman Penyusunan *Comfort Letter* Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah.
- c. Peraturan Nomor VIII.G.16 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala Daerah di Bidang Akuntansi Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah.
- d. Peraturan Nomor IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah.
- e. Peraturan Nomor IX.C.13 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah.
- f. Peraturan Nomor IX.C.14 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi
- g. Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah.
- h. Keputusan Direksi PT Bursa efek Surabaya No. SK-010/Dir/BES/V/2007 tentang Peraturan Pencatatan Obligasi Daerah.

3) Pendapatan Perkapita Penduduk Indonesia

Pendapatan merupakan salah satu indikator dari kemakmuran masyarakat. Dari pendapatan perkapita penduduk itulah dapat kita identifikasikan kemampuan daya beli masyarakatnya. Maka peningkatan pendapatan perkapita Indonesia dari tahun 2010 s.d. 2014 yang dilansir oleh BPS, mengidentifikasi peningkatan kemakmuran masyarakat.



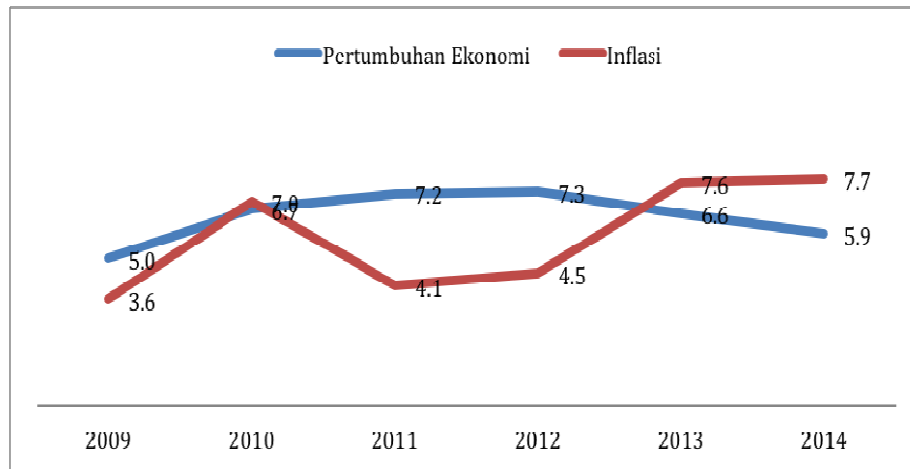
Gambar 4.4 Pendapatan Nasional PerKapita 2

Sumber : BPS

4) Inflasi Nasional

Inflasi merupakan salah satu risiko yang harus ditanggung oleh investor ketika melakukan investasi. Inflasi yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada Grafik 4.4 Angka inflasi yang berfluktuasi antara 6,9% - 7,7% dalam kurun waktu 5 tahun dapat meningkatkan resiko investasi, terutama dalam bentuk obligasi. Angka tersebut diatas target inflasi nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu sebesar 5,3% untuk Tahun 2014 dalam APBN-P. Namun angka inflasi tersebut cenderung dalam rentang yang aman dalam arti tidak berfluktuasi sangat tinggi sampai 2 digit. Sementara

itu, inflasi di luar dua tahun tersebut cenderung stabil pada kisaran angka 4,1%-4,5%.



Gambar 4.5 Angka Inflasi Nasional

Sumber : BPS, diolah

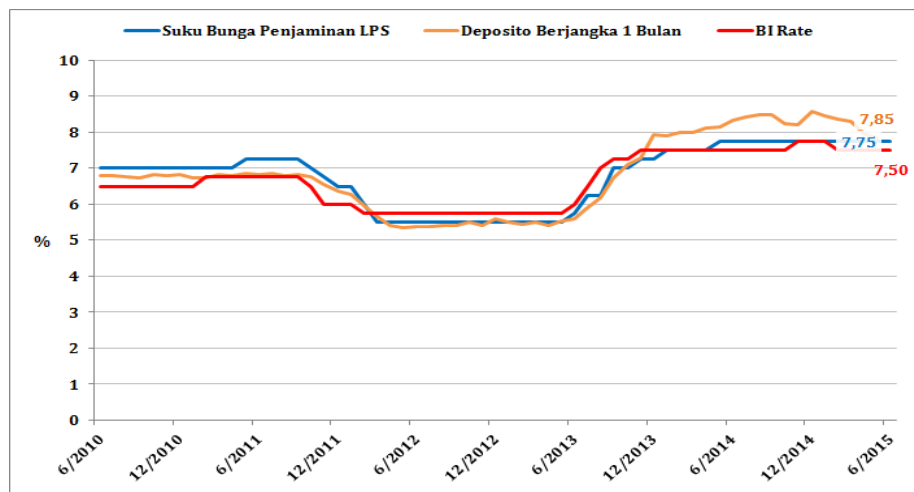
5) Penerbitan Obligasi Negara/SUN

Analisis terhadap produk sejenis perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan penerbitan obligasi daerah, yang salah satunya yaitu obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat/Surat Utang Negara (SUN). Hal ini perlu dilakukan sebagai perbandingan awal dan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai penerbitan obligasi pemerintah. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penerbitan Surat utang Negara (SUN) sampai dengan akhir 2014 penerbitan obligasi negara mencapai 41,37 triliun dan obligasi korporasi mencapai 4,8 triliun, sebuah angka yang cukup fantastis. Adapun nilai outstanding obligasi konvensional pemerintah selama 2010-2014 mengalami peningkatan. Pada akhir 2014 total outstanding obligasi konvensional pemerintah sebesar Rp.284,4 triliun, mengalami kenaikan sebesar 24,7% setiap tahunnya. Obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah selama ini cukup baik diterima oleh pasar,

sehingga menumbuhkan optimitas bagi Pemerintah Daerah untuk melirik alternatif pembiayaan melalui penerbitan obligasi daerah.

6). Suku Bunga Deposito dan Suku Bunga Pinjaman

Menurut Habibilah (2011), Obligasi daerah merupakan alternatif berinvestasi dapat dilihat dari dua pihak, yaitu dari pengguna (investor) dan pihak penerbit (pemerintah). Bagi investor, ketika akan memutuskan untuk berinvestasi dalam obligasi daerah terlebih dahulu membandingkan dengan investasi lain dari segi keuntungannya, misal dengan deposito yang keuntungannya dapat dilihat dari suku bunga. Sedangkan bagi pemerintah daerah, obligasi daerah merupakan sarana untuk memperoleh dana tambahan dengan nilai yang cukup besar, sehingga ketika akan menerbitkan obligasi daerah pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dengan biaya yang dikeluarkan, salah satunya adalah pinjaman dari bank.



Sumber : LPS

Gambar 4.6 Suku Bunga Deposito dan Suku Bunga Pinjaman

7) Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB merupakan salah satu faktor yang penting bagi Pemerintah sebelum merencanakan penarikan pinjaman. Hal ini berkaitan dengan adanya

peraturan pembatasan kumulatif pinjaman Pusat dan Daerah yang berdasarkan perkiraan PDB tahun yang berjalan. Peraturan tersebut ditetapkan setiap tahunnya oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2009, PDB Indonesia terus meningkat dengan rerata pertumbuhan diatas 5,62% dan di Tahun 2010 s.d 2015 sebesar 5,63%. Selain itu, defisit APBN yang masih dibawah angka 3% merupakan peluang bagi daerah untuk mendapatkan alternatif sumber pembiayaan yang baru, yang dalam penelitian ini adalah obligasi daerah.

8) Kredit Perbankan Umum

Faktor lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah kredit dan dana pihak ketiga di perbankan umum. Dana pihak ketiga sebagai sumber utama bagi perbankan dalam menjalankan kegiatannya operasionalnya. Apabila sumber dana yang dihimpun semakin besar, maka kemampuan bank dalam memberikan kredit juga akan semakin besar, begitu juga sebaliknya. Sedangkan suku bunga kredit merupakan faktor yang mempengaruhi debitur ketika akan melakukan pinjaman. Semakin besar bunga yang ditetapkan oleh pihak bank, maka akan mengurangi minat debitur dalam melakukan pinjaman di bank, dan sebaliknya. Hal ini juga berlaku bagi pemerintah daerah apabila ingin memperoleh sumber pembiayaan dari pihak bank.

4.5 Analisis dan Pembahasan

Setelah dilakukan identifikasi terhadap faktor internal dan faktor eksternal maka langkah selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut. Dimulai dari analisis kemampuan keuangan daerah untuk melakukan pinjaman yang dihitung menggunakan rasio DSCR, selanjutnya

analisis faktor-faktor internal dan eksternal ini akan dimulai dengan pembobotan setiap faktornya, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, hasil dari pembobotan tersebut kemudian akan dimasukkan kedalam matrik internal eksternal (matrik IE), sehingga diperoleh strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerbitkan obligasi daerah. Kemudian akan dilakukan pencocokan antara kekuatan dan kelemahan dalam faktor internal, dengan peluang dan hambatan dalam faktor eksternal, untuk memperoleh alternatif kebijakan yang tepat.

4.5.1 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam menganalisis kemampuan keuangan daerah ketika akan melakukan pinjaman salah satunya dihitung dengan menggunakan rasio *DSCR*. Perhitungan *DSCR* ini telah diatur dalam PP No. 30/2010, dimana *DSCR* disyaratkan minimal 2,5. Maka, dalam penelitian ini telah dilakukan perhitungan *DSCR* (sebagaimana dibahas dalam subbab 4.4.1, identifikasi faktor-faktor internal) dengan hasil 3,4.

Tabel 4.3

Proyeksi Pendapatan Daerah

URAIAN PENDAPATAN	TARGET MURNI					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2	3	4	5	6	7	8
PENDAPATAN DAERAH	16.651.601.834.434,20	15.233.790.219.731,20	15.494.845.333.710,80	16.414.278.993.786,50	17.323.440.633.341,10	18.371.484.088.816,80
PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.882.025.240.600,20	12.701.553.635.721,20	13.110.563.571.655,30	13.846.019.667.194,90	14.546.304.665.147,70	15.366.982.978.565,30
PAJAK DAERAH	9.142.139.000.000,00	11.919.491.680.000,00	12.193.187.118.000,00	12.793.383.234.000,00	13.405.530.117.000,00	14.104.564.228.000,00
1. PKB	3.548.889.000.000,00	4.348.330.000.000,00	4.374.825.000.000,00	4.441.832.000.000,00	4.476.392.000.000,00	4.549.653.000.000,00
2. BBNKB	4.178.074.000.000,00	4.285.368.000.000,00	4.270.432.000.000,00	4.543.451.000.000,00	4.841.485.000.000,00	5.166.872.000.000,00
3. PBBKB	1.373.880.000.000,00	1.910.337.680.000,00	2.044.081.318.000,00	2.187.145.610.000,00	2.340.245.803.000,00	2.504.063.009.000,00
4. PAJAK AIR	40.296.000.000,00	40.296.000.000,00	40.296.000.000,00	40.296.000.000,00	40.296.000.000,00	40.296.000.000,00
- AIR PERMUKAAN	40.296.000.000,00	40.296.000.000,00	40.296.000.000,00	40.296.000.000,00	40.296.000.000,00	40.296.000.000,00
5. PAJAK ROKOK	-	1.355.160.000.000,00	1.463.572.800.000,00	1.580.658.824.000,00	1.707.111.314.000,00	1.843.680.219.000,00
RETRIBUSI DAERAH	57.327.135.485,00	60.582.372.500,00	61.031.112.794,33	62.971.902.181,19	64.974.408.670,56	67.040.594.866,28
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	240.148.000.000,00	273.408.000.000,00	286.420.295.187,47	312.799.804.274,24	341.808.447.727,89	373.070.585.663,63
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	442.411.105.115,20	448.071.583.221,20	569.925.045.673,53	646.864.926.739,46	734.191.691.749,28	822.307.570.035,43
DANA PERIMBANGAN	2.583.041.104.821,00	2.510.457.011.000,00	2.365.498.833.769,67	2.547.442.207.172,76	2.754.064.354.741,39	2.978.930.841.062,72
1. Dana Bagi Hasil Pajak /Hasil Bukan Pajak	1.030.516.043.821,00	1.038.004.000.000,00	861.084.826.845,00	910.038.002.035,95	971.913.617.870,49	1.038.967.979.052,43
2. Dana Alokasi Umum	1.472.453.011.000,00	1.472.453.011.000,00	1.504.414.006.924,67	1.637.404.205.136,81	1.782.150.736.870,90	1.939.982.862.010,29
3. Dana Alokasi Khusus	80.072.050.000,00	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.186.535.489.013,00	21.779.573.010,00	18.782.928.285,55	20.817.119.418,87	23.071.613.451,94	25.570.269.188,78

Sumber : RPJMD 2014-2019

Dalam RPJMD 2014-2019, pendapatan daerah diproyeksikan akan meningkat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2016, Pendapatan Daerah diperkirakan meningkat menjadi 16,414 trilyun rupiah. Pendapatan Asli Daerah meningkat menjadi 13,846 trilyun rupiah. Dana perimbangan menjadi 2,547 trilyun rupiah dan lain-lain PAD menjadi 646,864 miliar rupiah.

- 2) Tahun 2017, Pendapatan Daerah diperkirakan meningkat dari tahun sebelumnya, menjadi 17,323 trilyun rupiah. Pendapatan asli daerah juga diperkirakan meningkat menjadi 14,546 trilyun rupiah. Dana perimbangan meningkat menjadi 2,754 trilyun rupiah. dan pendapatan lain meningkat menjadi 734,191 miliar rupiah.
- 3) Tahun 2018, Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat dari tahun sebelumnya, menjadi 18,371 trilyun rupiah. Pendapatan asli daerah juga diperkirakan meningkat menjadi 15,366 trilyun rupiah. Dana perimbangan meningkat menjadi 2,978 trilyun rupiah. dan pendapatan lain meningkat menjadi 822,307 miliar rupiah

Untuk mengoptimalkan pengelolaan PAD, dapat dilakukan dengan memperbaiki kebijakan pengelolaan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia/pegawai. Dari sisi kebijakan dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, memperjelas peraturan pemungutan pajak/retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah, meningkatkan pengawasan, melakukan tertib administrasi. Dengan adanya perbaikan dari sisi kebijakan maka kemampuan pegawai yang melaksanakan kebijakan tersebut juga perlu ditingkatkan dengan memberikan pelatihan, diklat, dan atau kursus tentang pengelolaan keuangan daerah. Selain peningkatan dari sisi internal, secara eksternal dapat dilakukan dengan cara meningkatkan iklim investasi dengan harapan dapat menarik investor. Perkembangan perekonomian akan meningkatkan basis dari pendapatan asli daerah, selain juga akan dapat meningkatkan bagi hasil dari pajak.

4.5.2 Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Dalam menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal ini akan dimulai dengan pembobotan setiap faktornya, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, hasil dari pengskoran tersebut kemudian akan dimasukkan kedalam matrik internal eksternal (matrik IE), sehingga diperoleh strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerbitkan obligasi daerah. Kemudian akan dilakukan pencocokan antara kekuatan dan kelemahan dalam faktor internal, dengan peluang dan hambatan dalam faktor eksternal, untuk memperoleh alternatif kebijakan yang tepat.

4.5.2.1 Faktor Internal

Menurut Habibillah (2011), beberapa aspek yang termasuk dalam faktor internal, antara lain :

1. *DSCR*.
2. Batasan Maksimal Pinjaman.
3. Sisa Pinjaman Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Sumber daya Manusia/Pegawai.
5. Hasil audit BPK terhadap LKPD.
6. RPJP Provinsi Jawa Barat 2005-2025.
7. Masa kerja kepala daerah.
8. Transparansi pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Untuk menentukan bobot setiap faktor internal digunakan metode *paired comparison* dengan skala sebagai berikut :

- 1 : jika faktor vertikal kurang penting daripada faktor horizontal.
- 2 : jika faktor vertikal sama penting dengan faktor horizontal.
- 3 : jika faktor vertikal lebih penting daripada faktor horizontal

Selanjutnya, dalam penentuan rating masing-masing faktor berdasarkan hasil wawancara dan skala sebagai berikut :

1. *DSCR*.

Sesuai dengan PP 30/2011, *DSCR* disyaratkan minimal 2,5 yang berarti jumlah penerimaan setelah dikurangi belanja wajib masih 2,5 kali dari beban hutang yang ditanggung pemerintah daerah. Oleh karena itu, semakin besar rasio *DSCR* maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk membayar kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan skala rating untuk *DSCR* adalah :

1 : Jika $DSCR < 2,5$	3 : $5 < DSCR < 10$
2 : Jika $2,5 < DSCR < 5$	4 : $DSCR > 10$

2. Batasan Pinjaman.

Batasan pinjaman bagi pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan batas maksimal 60% dari PDB, sedangkan kumulatif Pinjaman Daerah tidak boleh melebihi 0,3% dari PDB (PMK No. 111/PMK.07/2011). Maka semakin besar rasio pinjaman Pemerintah Pusat terhadap PDB akan mengurangi kemungkinan Daerah untuk melakukan pinjaman sesuai dengan batasan 75% dari Penerimaan umum daerahnya. Sehingga penentuan rating berdasarkan rasio hutang Pemerintah Pusat dengan PDB, yaitu :

1 : 45% - 60%	3 : 20% - 30%
2 : 30% - 45%	4 : < 20%

3. Sisa Pinjaman.

Jumlah maksimal pinjaman daerah juga dibatasi oleh ketentuan 75% dari Penerimaan umum APBD. Maka penentuan rating dilihat dari jumlah sisa pinjaman dibandingkan jumlah maksimal pinjaman, yaitu :

- 1 : sisa Pinjaman > 75% Penerimaan Umum
 - 2 : 75% PU > sisa pinjaman > 50% Penerimaan Umum
 - 3 : 50% PU > sisa pinjaman > 25% PU
 - 4 : sisa pinjaman < 25% PU
4. Sumber daya manusia/pegawai.
- Dalam perencanaan penerbitan obligasi daerah dibutuhkan berbagai analisis dari berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, peratingan pegawai di bidang perencanaan, keuangan dan perekonomian yang sesuai dengan PMK No. 111/PMK.07/2011 didasarkan pada jenjang pendidikan minimal S1 dengan telah mengikuti sertifikat keahlian tertentu, yaitu :
- 1 : Pegawai < 25%
 - 2 : 25% < pegawai < 50%
 - 3 : 50% < pegawai < 75%
 - 4 : Pegawai > 75 %
5. Hasil audit BPK atas LKPD.
- Peratingan yang dilakukan berdasarkan pada opini yang diberikan BPK atas LKPD, yaitu:
- 1 : disclaimer/tidak memberikan pendapat
 - 2 : TW (tidak wajar)
 - 3 : WDP (wajar dengan pengecualian)
 - 4 : WTP (wajar tanpa pengecualian)
6. RPJPD
- Peratingan terhadap RPJPD ditentukan terhadap kesesuaian antara rencana pembangunan proyek dengan yang tercantum di dalam RPJPD. Nilai pembobotan didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak terkait.

7. Masa Kerja Pejabat Daerah.

Penentuan rating berdasarkan pada lamanya pejabat daerah menjabat. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, ditetapkan bahwa masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun, dan maksimal dua kali masa menjabat (10 tahun). Dengan asumsi bahwa semakin lama Kepala Daerah menjabat, maka semakin baik dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Dan karena hanya ada dua periode, maka rating akan ditentukan sebagai berikut:

1 : -

2 : 5 tahun

3 : 10 tahun

4 : -

8. Transparansi pengelolaan pemerintahan.

Dalam menentukan transparansi pengelolaan pemerintahan dapat dilihat dengan keberadaan website daerah, kelengkapan informasi dan keterkinian informasi yang ditampilkan. Maka penentuan rating transparansi sebagai berikut :

1 : tidak memiliki web

2 : memiliki web

3 : memiliki web dengan informasi lengkap.

4 : memiliki web dengan informasi lengkap dan terupdate.

Rumus penentuan bobot setiap faktor :

$$a_i = \frac{X_i}{\sum_{i=1}^n X_i}$$

A_i : Bobot faktor ke i

X_i : Nilai faktor ke i

i : faktor ke 1,2,3,...n

n : jumlah faktor

Dari rumus tersebut didapatkan hasil sebagaimana ditampilkan dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4
Pembobotan Faktor Internal

Faktor <i>Internal Strategy</i>	Bobot	Rating	Skor
1. <i>DSCR</i>	0,13	4	0,52
2. Batasan Pinjaman	0,13	4	0,52
3. Sisa Pinjaman	0,13	4	0,52
4. SDM	0,10	3	0,30
5. Audit LKPD	0,10	3	0,30
6. RPJPD	0,18	3	0,54
7. Masa Kerja Pejabat Daerah	0,12	3	0,36
8. Transparansi	0,11	3	0,33
TOTAL	1		3,33

Nilai pembobotan pada faktor strategi internal didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait (Biro Keuangan, Biro Investasi dan BUMD Provinsi Jawa Barat) dan Badan Kebijakan Fiskal. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat delapan faktor yang termasuk dalam faktor strategi internal, apabila dibagi secara rata menghasilkan angka 12,5%. Tidak semua faktor menghasilkan angka 12,5% karena ada beberapa faktor yang memiliki dukungan lebih kuat daripada faktor yang lain dan ada yang lebih dalam mendukung. Interviewer menegaskan bahwa RPJPD dan masa kerja pejabat daerah merupakan faktor yang lebih besar daripada faktor yang lain, sekitar 30%. Dari angka ini kemudian dibagi menjadi dua, maka menghasilkan angka 18%, karena RPJPD sedikit lebih dominan daripada masa kerja pejabat daerah dan telah ditetapkan terlebih dahulu dalam jangka waktu yang panjang (25 tahun), maka pembobotannya sedikit lebih tinggi daripada masa kerja pejabat daerah. Maka nilai yang tepat sekitar 18% dan masa kerja pejabat

daerah sekitar 12%. Hal ini merupakan satu paket karena kepala daerah akan menentukan arah RPJPD

Selanjutnya, sisa pinjaman. Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan dan hasil dari konfirmasi kepada pihak yang berkepentingan, Pemprov. Jawa Barat belum memiliki pinjaman. Namun karena sisa pinjaman yang dimiliki Jawa Barat tidak ada, maka angka yang tepat sekitar 13%. Faktor berikutnya dalam strategi internal adalah *DSCR* dan Batasan Pinjaman. Kedua faktor ini cukup berpengaruh pada faktor internal, sekitar 26% dari total 100%. pembobotan untuk *DSCR* dan batasan pinjaman sekitar 26%, bila dibagi masing-masing sebesar 13%.

Faktor strategi internal selanjutnya adalah SDM dan audit LKPD. SDM dan Audit LKPD masing-masing mendapatkan 10% sedangkan faktor transparansi mendapatkan 11%. Dari faktor internal Provinsi Jawa Barat, diperoleh skor 3,33, hal ini mengindikasikan bahwa faktor internal Provinsi Jawa Barat untuk menerbitkan Obligasi Daerah cukuplah kuat.

4.5.2.2 Faktor Eksternal

Habibillah (2011), menentukan faktor-faktor eksternal yaitu:

1. Kelengkapan peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan perkapita penduduk Indonesia
3. Produk Domestik Bruto (PDB)
4. Inflasi
5. Penerbitan obligasi negara/SUN
6. Suku bunga deposito
7. Kredit yang dikeluarkan perbankan

Kemudian dalam menentukan rating masing-masing faktor tersebut digunakan skala sebagai berikut :

1. Kelengkapan peraturan perundang-undangan, ditentukan berdasarkan kelengkapan peraturan disetiap tingkatan.

1 : UU	3 : UU, PP, dan PMK
2 : UU dan PP	4 : UU, PP, PMK, dan SE Dirjen.

2. Pendapatan perkapita, menurut World Development Report - World Bank (2013):

1 : Pendapatan perkapita < US\$ 1.025
2 : US\$ 1.026 < Pendapatan Perkapita < US\$ 4.035
3 : US\$ 4.036 < Perndapatan perkapita < US\$ 12.475
4 : Pendapatan perkapita > US\$ 12.476

3. Produk Domestik Bruto.

Untuk melakukan rating terhadap PDB penentuannya sebagai berikut :

1 : Menurun	3 : Meningkatkan s.d. 25 %
2 : Tetap	4 : Meningkatkan lebih dari 25%

4. Inflasi.

Penentuan rating pada inflasi ditentukan sebagai berikut :

1 : Inflasi > 100%	3 : 10% < inflasi < 30%
2 : 30% < inflasi < 100%	4 : 0 % < inflasi < 10%

5. Obligasi negara/SUN.

Penentuan rating terhadap obligasi negara/SUN Pemerintah Indonesia yang diberikan oleh Lembaga Pemeringkat (standard and poor).

1 : BB- and B	3 : A
2 : BB and BBB	4 : AA dan AAA

6. Suku Bunga deposito.

Keuntungan yang diperoleh oleh nasabah tercermin dalam suku bunga riil, yaitu suku bunga nominal dikurangi inflasi (*efek Fisher*). Namun suku bunga yang ditetapkan oleh perbankan merupakan suku bunga nominal.

Oleh karena itu, penentuan rating suku bunga ditentukan dengan membandingkan suku bunga deposito dengan inflasi.

1 : -

2 : Suku bunga deposito < inflasi

3 : Suku bunga deposito = inflasi

4 : Suku bunga deposito > inflasi

7. Kredit perbankan, penentuan rating dilakukan dengan rasio kredit terhadap DPK (*LDR*).

1 : $LDR < 50\%$

2 : $50\% < LDR < 75\%$

3 : $75\% < LDR < 90\%$

4 : $90\% < LDR < 100\%$

Tabel 4.5

Pembobotan Faktor Eksternal

Faktor Eksternal Strategy	Bobot	Rating	Skor
1. Peraturan Perundangan	0,20	4	0,80
2. Pendapatn PerKapita	0,16	3	0,48
3. PDB	0,16	3	0,48
4. Inflasi	0,12	3	0,36
5. Obligsi Negara/SUN	0,18	2	0,36
6. Suku Bunga Deposito	0,10	2	0,20
7. Ekspansi kredit perbankan	0,08	2	0,16
TOTAL	1		2,84

Seperti pembobotan pada faktor strategi internal, pembobotan pada faktor strategi eksternal ini juga didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait (Biro Keuangan dan Biro Investasi dan BUMD) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Dari hasil wawancara ini diketahui bahwa ada tujuh faktor yang termasuk dalam faktor strategi eksternal, apabila dibagi secara rata menghasilkan angka 14,28%. Angka ini tidak didistribusikan secara merata terhadap tujuh faktor tersebut diatas karena terdapat faktor yang lebih berpengaruh diantara satu dengan lainnya. Dari ketujuh faktor tersebut, peraturan perundang-undangan merupakan faktor eksternal yang lebih berpengaruh daripada faktor yang lain, informan mengatakannya sekitar 20%. Namun, apabila dilihat lebih dalam dan berdasarkan data yang juga turut mendukung, seperti dukungan dari Bapepam dan LK lain yang juga sudah turut membuat peraturan, maka pembobotan untuk peraturan perundang-undangan ini sekitar 20%.

Selanjutnya, informan mengatakan bahwa faktor eksternal lain yang juga cukup kuat mempengaruhi adalah pendapatan domestik bruto (PDB) dan penerbitan obligasi negara/sun. Kedua faktor ini berpengaruh sekitar 34%, namun karena melihat dari obligasi negara yang terus meningkat jumlah penerbitannya sedangkan PDB masyarakat yang peningkatannya kurang signifikan, maka bobot untuk kedua faktor ini sekitar 34%, yang apabila dibagi masing-masing sekitar 16% untuk PDB dan 18% untuk obligasi negara/SUN. Faktor berikutnya adalah pendapatan perkapita yang berpengaruh sekitar 16%, munculnya angka ini dilihat dari pendapatan perkapita penduduk yang mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan.

Faktor yang dibawah rata-rata adalah inflasi, suku bunga deposito dan ekspansi kredit perbankan dengan jumlah bobot 30%. Dari ketiga

faktor ini, inflasi merupakan faktor yang lebih dominan karena interviewer memandang bahwa adanya inflasi ini mengkhawatirkan bagi pemegang obligasi, sedangkan suku bunga deposito juga turut menjadi perhitungan sebagai pesaing dari obligasi daerah, dan ekspansi kredit perbankan merupakan salah alternatif bagi perbankan untuk mengembangkan usaha, hal ini masih bisa dikontrol dibawah pengawasan perbankan pusat. Interviewer mengatakn bahwa suku bunga deposito berpengaruh sekitat 10%, sedangakn inflasi 2% lebih tinggi yaitu sebesar 12% dan ekspansi kredit perbankan 2% lebih rendah daripada suku bunga deposito yakni sebesar 8%. Dari faktor eksternal Provinsi Jawa Barat diperoleh skor 2,84. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki respon yang cukup baik dalam memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman.

4.4.2.3 Matriks Hasil Analisis

Dari perhitungan bobot faktor internal dan faktor eksternal, selanjutnya dimasukkan kedalam matrik IE, sehingga hasil yang diperoleh tampak pada gambar 4.6. Nilai skor IFE adalah 3,33. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kondisi internal Provinsi Jawa Barat cukup kuat dalam mendukung penerbitan obligasi daerah. Sedangkan nilai skor untuk EFE sebesar 2,84 yang berada di sel IV mengidentifikasikan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki kemampuan dalam merespon peluang yang muncul dan menghindari ancaman yang mungkin terjadi.

Skor EFE	4	III <i>Hold and maintain</i>	II <i>Grow and build</i>	I <i>Grow and build</i>	
	3	VI <i>Harvest and divestiture</i>	V <i>Hold and maintain</i>	IV <i>Grow and build</i>	
	2	IX <i>Harvest and divestiture</i>	VIII <i>Harvest and divestiture</i>	VII <i>Hold and maintain</i>	
	1				
		1	2	3	4
		Skor IFE			

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Gambar 4.7 Matrik Internal Eksternal

Selanjutnya, dari skor IFE dan EFE dimasukkan ke dalam matrik Internal Eksternal (IE) yang memiliki sembilan sel. Dalam matrik tersebut diketahui bahwa provinsi Jawa Barat berada di sel IV dengan strategi *grow and built*. Strategi yang bisa dikembangkan adalah strategi intensif yang meliputi *market penetration* (penetrasi pasar), *market development* (pengembangan pasar) dan *product development* (pengembangan produk). Strategi *Grow and Build* ini diambil karena kuatnya faktor internal, namun masih adan ancaman dari faktor eksternal yang harus dihadapi. Oleh karena itu, strategi yang sesuai yaitu dengan mengembangkan kekuatan internal dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi ancaman dan kelemahan internal. Dari hasil tersebut diatas, pemerintah provinsi Jawa Barat dapat menentukan sendiri strategi apa saja yang akan diambil.

4.5.3 Proyeksi Perhitungan Bandara Kertajati

Perhitungan ini bersumber dari paparan dengan judul Kajian BUMD Pengelola Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan *Aerocity* oleh Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah pada 25 April 2013. Dalam perhitungan

analisis ini digunakan berbagai asumsi yaitu investasi berasal dari pinjaman jangka panjang dengan *grace period* selama 5 tahun, jangka waktu pengembalian 20 tahun dan suku bunga 15%.

1. Pendapatan Aeronautica

- a. Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) Tarif yang diperhitungkan dalam menghitung pendapatan Bandar Udara Majalengka adalah berdasarkan tarif yang diberlakukan di bandara PT. API DAN PT APII. Ramalan kenaikan penumpang dan pesawat merupakan dasar perhitungan kenaikan pendapatan.
- b. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) Perhitungan pendapatan dari PJP4U mengasumsikan bahwa 2% dari pesawat yang tiba akan disimpan (RON). Parking surcharge mengasumsikan bahwa pesawat yang terkena penalti *surcharge* $\pm 2\%$ dari jumlah pesawat yang datang.

2. Pendapatan *Non-Aeronautic*

Pendapatan *non-aeronautic* diperoleh dari berbagai sumber, seperti parkir kendaraan, pelayanan gudang, konsesi, pemasangan reklame, penyewaan saluran telepon, pemakaian counter, penjualan air bersih dan lain lain. Diperkirakan pendapatan dari *aeroanautic* tidak dapat mencukupi kebutuhan bandara. Mengikuti trend yang sekarang diterapkan di banyak bandara, konsep bandara Kertajati adalah *business airport* (bandara yang dikelola secara bisnis). Kegiatan bandara tidak hanya terpusat pada pelayanan penerbangan saja tetapi memanfaatkan sebanyak mungkin semua fasilitas yang ada di bandara dan sekitarnya yang masih dibawah pengelolaannya untuk kegiatan bisnis tanpa mengabaikan aspek keselamatan penerbangan. Dengan mengambil model bandara yang ada, diperkirakan pendapatan bandara pada tahun pertama sampai tahun

kelima 40% dari total pendapatan bandara. Seiring dengan berjalannya waktu, diharapkan bandara dengan bisnisnya sudah dikenal masyarakat pada tahun kelima sampai kesepuluh diharapkan pendapatan dari non-aeronautic sudah meningkat menjadi seimbang dengan pendapatan aeronautic, yaitu 50%: 50%. Selanjutnya diharapkan dibawah good governance pendapatan *non-aerorteutic* akan menjadi 60% dari total pendapatan bandara.

Disebelah selatan *public area* terdapat lahan \pm 100 hektar, yang dapat diusahakan (*area commercial*). Dalam perincian perhitungan finansial ini diasumsikan lahan disewakan selama 25 tahun dengan harga sewa Rp2.500,-/bln/m². Luas lahan yang akan disewakan \pm 75% dari lahan yang tersedia sehingga setiap tahun bandara akan mendapat penghasilan tambahan sebesar Rp. 22.500.000.000,- Diasumsikan lahan akan disewa 5 tahun setelah bandara beroperasi.

3. Pengeluaran (*expenditure*) Bandara

Sumber-sumber pengeluaran (*cost center*) bandara terbentuk dari akumulasi belanja pegawai, biaya pemeliharaan ringan (*light repair*), biaya operasi (transportasi dan administrasi), biaya ATK serta biaya biaya umum lainnya. Dengan mengambil model dari bandara yang ada diasumsikan pengeluaran bandara diluar investasi pada tahun pertama sampai tahun kelima adalah 50% dari total pendapatan bandara, diluar penyewaan lahan pada area komersial. Selanjutnya tahun kelima sampai tahun kesepuluh pengeluaran (*cost*) yang harus dikeluarkan adalah sebesar 40% dari total pendapatan bandara, kemudian untuk tahun tahun selanjutnya, pengeluaran bandara diharapkan dapat ditekan menjadi hanya 30% dari total pendapatan bandara. Hal ini dapat dicapai apabila bandara benar benar dikelola dengan *good governance*.

Hasil perhitungan *feasibility study* menyatakan bahwa proyek dapat dilaksanakan dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

- Tidak memperhitungkan penyusutan karena bersifat *non cash*.
- $NPV = 852.137.140,035 > 0$
- $IRR = 24,52\% > 15$
- $PI/BCR = 1,521 > 1$
- *Discounted Payback Period* = 12 Tahun 9 Bulan

Dengan catatan :

- a. *Grace Period* 5 tahun
- b. Jangka waktu pengembalian utang 20 tahun
- c. Fasilitas sisi udara disubsidi

Indikator kelayakan secara ekonomi

No	Indikator	Nilai
1	<i>NPV</i> Manfaat Ekonomi	9.736 trilyun
2	<i>NPV</i> Biaya Ekonomi	6.156 trilyun
3	<i>NPV</i> Manfaat - <i>NPV</i> Biaya Ekonomi	3.580 trilyun
4	<i>EIRR</i>	24,71 trilyun
5	<i>BCC</i>	1.58
	Kesimpulan	secara ekonomi layak

Beberapa keterbatasan yang ada dalam perhitungan tersebut yaitu:

1. Perhitungan dilaksanakan pada tahun 2013 dan tidak dilakukan pemutakhiran data kembali.
2. Peneliti kesulitan untuk mendapat akses terhadap hasil kajian dan *feasibility study* sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan kembali oleh peneliti.